

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIK
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang SISDIK
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang SISDIK
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang SISDIK
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang SISDIK
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang SISDIK
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2008 tentang SISDIK
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang SISDIK
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2008 tentang SISDIK
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang SISDIK
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
23. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN

KETIGA

: Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan BHAKTI MADANI SUBANG
Alamat : Jalan Arif Rahman Hakim Blok Kopti No
126 Kecamatan Subang Kabupaten
Subang

untuk melanjutkan dan menyelenggarakan :

Nama : **SEKOLAH DASAR ISLAM PLUS AL
MADANI**
Mulai Berdiri : 2018

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada Diktum
PERTAMA berlaku selama mematuhi semua ketentuan yang
berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi)
pada setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pembinaan
SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan,
dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 24 Agustus 2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG,**



[Handwritten Signature]
Drs. H. SUWARNA M, M.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19590605 198302 1 006

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.2/448-Disdikbud/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR (SD) ISLAM PLUS AL MADANI
KECAMATAN SUBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUBANG,

- Menyatakan :
- bahwa pelayanan pendidikan sekolah Dasar sangat diperlukan dalam upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak didik di luar lingkungan keluarga sebelum memasuki pendidikan lanjutan di Kabupaten Subang;
 - bahwa Sekolah Dasar (SD) **ISLAM PLUS AL MADANI** yang telah diselenggarakan dan memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar **ISLAM PLUS AL MADANI** Kecamatan Subang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;